BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan pemungkinan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menciptakan suasana atau iklim usaha lebih optomal dan menghilangkan sekat kultur dan struktur belum ada wujud nyata. Faktor hambatan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum menciptakan suasana atau iklim usaha lebih optomal karena biaya persyaratan untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga program belum terlaksananya dengan maksimal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) Selain itu tidak adanya komunikasi yang baik antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung deng pengrajin boneka dan sesama pengrajin Boneka Sukamulya.
2. Pemberdayaan UMKM sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan Penguatan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam memperkuat pengetahuan telah dilakukan. Faktor penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung hanya memberikan sosialisasi

pentingnya mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) tanpa memberikan bantuan modal untuk mengikuti program sehingga program belum terlaksananya dengan maksimal. Selain itu kurangya partisipasi mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) maka kurangya inovasi program untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

3. Pemberdayaan UMKM sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan Perlindungan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melindungi para pengrajin UMKM Sentra Boneka Sukamulya belum tercapai. Faktor Penghambat dalam aspek ini adalah belum adanya perlindungan produk oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebelum mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) dan terkendala terlalu mahalnya persyaratan mengikuti program. Sedangkan Upaya penghapusan diskriminasi belum baik karena tidak ada koordinasi harga tetap oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan pengrajin boneka sehingga ada persaingan yang tidak sehat terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).
4. Pemberdayaan UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan Penyokongan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam memberi bimbingan dan dukungan belum dilakukan. Faktor hambatan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum memberikan dukungan modal dan mahalnya bimbingan untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) terlalu mahal sehingga bimbingan dan dukungan program belum terlaksananya dengan maksimal.

5. Pemberdayaan UMKM sentra Boneka Sukamulya melalui pendekatan Pemeliharaan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam memelihara kondisi yang kondusif. Faktor hambatan adalah kurang ada kerjasama antar sentra belum terjadinya keselarasan selain itu belum ada regulasi tentang bantuan modal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk sentra Boneka Sukamulya sehingga kondisi yang baik antar sentra dan dinas belum berjalan maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemungkinan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung harus menyediakan modal dan fasilitas gratis untuk mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai balai pertemuan, dan balai pelatihan. Hal tersebut untuk memungkinkan terciptanya suasana atau iklim usaha agar para pelaku berkembang lebih optimal. Sehingga tidak akan ada lagi hal yang memberatkan pengrajin boneka untuk tidak mengikuti program. Karena semuanya akan mengikuti program terpusat dalam satu buah wadah yang sama dan harmonisasi tetap terjaga dalam kegiatan yang sama.
2. Penguatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung harus memberikan anggaran untuk semua pengrajin boneka mengikuti Program Standar Nasional Indonesia (SNI), karena para pengrajin yang tidak memiliki anggaran tidak bisa mengikuti kegiatan Program Standar Nasional Indonesia (SNI), dan berikan sebuah program yang terbarukan agar tumbuh sebuah kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan terhadap para pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya.
3. Perlindungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung segera berikan tempat dan wadah bagi para pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya. Sehingga para pelaku usaha memiliki sebuah melalui komunikasi yang baik kepada pemerintah. Keselarasan perlu difasilitasi balai pertemuan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung di Sentra Boneka Sukamulya dan

perlunya sebuah regulasi bantuan modal untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).

4. Penyokongan, Dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan inovasi program dan level yang ditunjang oleh modal dan peralatan yang lebih modern dan canggih. Konsistensi dan keberlanjutan program harus terus diupayakan, terlebih dalam memberikan sebuah arahan dan bimbingan agar para pelaku lebih berkembang dalam menghadapi Menghadapi Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).
5. Pemeliharaan, Dalam aspek ini perlu adanya sebuah regulasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang memfokuskan bahwa Sentra Boneka Sukamulya yang merupakan kawasan sentra industri berskala rumahan. Agar tetap terjadinya sebuah keseimbangan distribusi. Sedangkan sebuah keselarasan yang sudah dibangun oleh para pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar terjadinya kerjasama yang baik antar sesama sentra. Program-program maupun kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung diharapkan dilakukan secara merata.